

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah masalah yang penting dalam perekonomian suatu negara yang sudah menjadi agenda setiap tahunnya dan dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004). Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994).

Pembangunan ekonomi sendiri disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, yang *pertama* adalah suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus. *Kedua*, suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. *Ketiga*, adalah kenaikan *income* perkapita itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1997).

Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi meningkat (Arsyad, 2004).

Berhasilnya suatu pembangunan ekonomi oleh suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator perekonomian salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang termasuk dalam salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan PDRB secara terus menerus. Pembangunan suatu negara yang baik juga harus diikuti pembangunan ekonomi yang baik juga. Hal ini bisa dilihat dari periode ke periode lainnya bahwa kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

TABEL 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Sepuluh
Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2007-2013 (Milyar Rupiah)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Aceh	35 983,09	34 097,99	32 219,09	33 103,08	34 704,82	36 487,88	38 012,97	244,610
Sumatera Utara	99 792,27	106 172,36	111 559,22	118 718,90	126 587,62	134 461,51	142 537,12	839,827
Sumatera Barat	32 912,97	35 176,63	36 683,24	38 862,14	41 293,35	43 925,82	46 640,24	275,493
Riau	86 213,26	91 085,38	93 786,24	97 735,60	102 665,96	106 298,73	109 073,14	686,858
Jambi	14 275,16	15 297,77	16 274,91	17 471,69	18 963,52	20 373,53	21 979,28	124,633
Sumatera Selatan	55 262,11	58 065,46	60 452,94	63 859,14	68 008,50	72 095,88	76 409,76	454,151
Bengkulu	7 037,40	7 441,87	7 859,92	8 339,75	8 878,82	9 464,83	10 052,31	59,070
Lampung	32 694,89	34 443,15	36 256,30	38 389,90	40 858,94	43 526,87	46 123,35	272,290
Kep. Bangka Belitung	9 464,54	9 899,93	10 270,11	10 884,95	11 592,89	12 257,11	12 905,01	77,271
Kepulauan Riau	34 713,81	37 014,74	38 318,83	41 075,86	43 809,83	46 796,68	49 667,22	291,392

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Data pada Tabel 1.1 menggambarkan PDRB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Pulau Sumatera tahun 2007-2013 berfluktuatif. Pulau Sumatera memiliki kontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara nasional. Salah satu kontribusi terbesar yaitu dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 839,827 Milyar Rupiah dan disusul oleh Provinsi Riau sebesar 686,858 Milyar Rupiah. Sedangkan kontribusi terendah yaitu dengan Provinsi Bengkulu yang sebesar 59,070 Milyar Rupiah. Tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau dikarenakan sumber daya alam yang menjadi kontribusi utama seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dan lain sebagainya.

Jika diamati, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Provinsi Riau meningkat terus menerus dan stabil. Terlihat bahwa sektor-sektor yang ada di Provinsi Riau seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang sangat besar. Hal ini memberikan pandangan bahwa perubahan pada sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila suatu sektor melemah pastinya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dengan hal ini, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saling berkaitan antar variabel seperti belanja daerah, tenaga kerja dan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan mengelola potensi dan sumber daya yang ada bagi masing-masing daerah sehingga mampu untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut.

Salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah belanja daerah. Teori Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Jadi menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional maka diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Implementasi kedua konsep dan teori tersebut (Klasik dan

Keynesian) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi baik pada skala nasional maupun pada skala perekonomian makro daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

- a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

- b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan meliputi: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
- c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja.

Belanja daerah tersebut mencakup:

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.
2. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Pengeluaran pemerintah khususnya belanja daerah di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah mencapai Rp 4.006 Milyar Rupiah, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 4.468 Milyar Rupiah dan hingga tahun 2013 pengeluaran pemerintah terus meningkat hingga sebesar Rp 8.432 Milyar Rupiah. Dari data di atas, pengeluaran pemerintah Provinsi Riau begitu besar dan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

Disamping belanja daerah, salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi.

Tabel 1.2
Persentase Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	Jumlah
Bengkalis	63.59	64.78	65.25	169.14
Indragiri Hilir	61.86	67.27	72.68	201.81
Indragiri Hulu	59.56	60.18	60.80	180.54
Kota Dumai	60.36	57.98	55.60	173.94
Kota Pekanbaru	58.35	57.88	57.41	173.64
Pelalawan	65.39	63.30	61.21	189.90
Rokan Hilir	58.63	57.46	56.40	172.49
Rokan Hulu	56.80	56.60	56.40	169.80
Siak	60.83	58.57	56.31	175.71
Kampar	57.27	59.32	61.37	177.96
Kuantan Singingi	63.59	64.42	65.25	193.26
Kepulauan Meranti	64.90	65.61	56.29	186.80

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah persentase tenaga kerja tertinggi pada tahun 2012-2014 dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 201.81 persen dan diikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 193.26 persen, dikarenakan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai penduduk yang mayoritas adalah pekerja kebun kelapa sawit dan pekerja kebun karet. Sedangkan jumlah persentase tenaga kerja yang paling sedikit yaitu di Kabupaten Bengkalis sebesar 169.14 persen, dikarenakan

banyaknya pengangguran terserap di sektor informal yang tidak berkualitas. seperti ikut orang lain atau keluarganya yang menjadikan mereka tidak termasuk golongan tenaga kerja.

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2013-2015

Lapangan Usaha	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas				
	Februari 2013	Agustus 2013	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	46,31	44,63	42,41	44,28	46,09
Pertambangan dan Penggalian	1,62	1,75	1,73	1,87	1,32
Industri Pengolahan	4,79	6,42	5,51	6,51	4,90
Listrik Air dan Gas	0,23	0,27	0,31	0,45	0,12
Bangunan dan Konstruksi	4,71	5,46	5,54	5,04	4,84
Perdagangan Rumah Makan dan Hotel	20,78	19,91	20,50	21,05	16,04
Angkutan dan Komunikasi	3,55	3,67	3,79	3,71	3,85
Keuangan dan Asuransi	2,93	2,55	2,29	2,25	2,98
Jasa-Jasa	15,07	15,35	17,91	14,83	19,85
Jumlah / <i>Total</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Riau Dalam Angka, 2015

Dari data Tabel 1.3 pada tahun 2013-2015 menjelaskan bahwa disektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan hampir setengah dari seluruh sektor lapangan usaha disumbang oleh sektor pertanian. Sektor pertanian adalah pemasok sumber daya alam yang

diprioritaskan seperti pertanian kelapa sawit, karet, minyak dan gas, dll. Diikuti dengan sektor jasa, perdagangan, rumah makan dan hotel walaupun semua sektor lapangan usaha bersifat fluktuatif. Semakin banyak angkatan kerja semakin meningkat tenaga produktif, sehingga akan meningkatkan produksi. Dengan demikian semakin bertambah jumlah penduduk akan meningkatkan produksi barang dan jasa yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pasar.

Salah satu variabel yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembagian manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu kesehatan yang diukur dari rata-rata usia harapan hidup, pengetahuan dan pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dan standar hidup layak (kesejahteraan) secara keseluruhan Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu di maksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain dari pada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006).

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2007-2014

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kuantan Singingi	72.47	72.95	73.38	73.70	74.15	74.50	74.77	75.23
Indragiri Hulu	72.96	73.43	73.89	74.18	74.54	74.90	75.21	76.14
Indragiri Hilir	73.87	74.41	74.95	75.24	75.71	76.15	76.41	76.75
Pelalawan	71.43	72.07	72.69	73.18	73.59	73.92	74.27	74.53
Siak	75.15	75.64	76.05	76.46	76.92	77.27	77.44	77.65
Kampar	72.98	73.64	74.14	74.43	75.18	75.54	75.83	76.18
Rokan Hulu	71.43	71.84	72.29	72.66	73.10	73.62	73.87	74.16
Bengkalis	73.36	74.12	74.64	75.11	75.53	75.86	76.12	76.48
Rokan Hilir	71.06	71.51	71.98	72.43	72.83	73.17	73.45	73.74
Kepulauan Meranti	-	-	70.15	70.62	71.08	71.47	71.80	72.24
Pekanbaru	76.98	77.54	77.86	78.27	78.72	79.16	79.47	79.75
Dumai	76.31	76.91	77.33	77.75	78.25	78.73	78.99	79.43

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Provinsi Riau seperti juga Provinsi lainnya melaksanakan pembangunan secara bertahap sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun daerah. Pelaksanaan pembangunan bertahap tersebut pada dasarnya dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.

Faktanya pada tahun 2010 sampai tahun 2014, Provinsi Riau berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “sedang” pada tahun 2010 menjadi “tinggi” pada tahun 2014. Indeks pembangunan manusia untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sangat bervariasi, dimana Kota Pekanbaru adalah yang paling tertinggi dengan jumlah persentase sebesar 79.75 persen dan diikuti oleh Kota Dumai sebesar 79.43 persen.

Sedangkan jumlah indeks pembangunan terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Provinsi Riau tidak lepas dari kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sementara itu, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti belanja daerah, tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia di masing-masing daerah. Banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama seperti penelitian Santi Nurmainah (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah)” Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2007-2014”**.

B. Batasan Masalah

Karena ruang lingkup pertumbuhan ekonomi daerah sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah dengan melihat seberapa besar pengaruh belanja daerah, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah dibatasi pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak

langsung, tenaga kerja yang meliputi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha utama dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menggunakan data Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan seri 2000.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh nilai belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2007-2014?
2. Bagaimana pengaruh nilai tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2007-2014?
3. Bagaimana pengaruh nilai indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2007-2014?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat kita simpulkan beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2007-2014
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2007-2014

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2007-2014

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengimplikasikan dan mensosialisasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi tentang besarnya belanja daerah, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan bahan kajian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadikan bahan informasi dalam melakukan kebijakan dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui pengaruh antara belanja daerah, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau.